

PENGARUH PROFITABILITAS, KUALITAS AUDIT, NILAI PERUSAHAAN, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN DAN UKURAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP MANAJEMEN LABA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI

Tiara Syahrani

STIE Musi Rawas

Abstract

This study aimed to empirically examine the effect of profitability, audit quality, value company, independent board of commissioner, size of board of commissioner to earning management. The population of the data is the entire manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the period 2014 to 2017.

This study used purposive sampling method to select sample from the population. Based on this method, sample of 55 manufacturing firms were obtained from the period 2014-2017. The multiple linear regression was used to analysis data. Proxy measurements for earning management is using modified Jones models.

The result of multiple regression analysis show that the profitability and size of board of commissioner positively affecting to earning management, audit quality and independent board of commissioner negatively affecting to earning management. While the value company has not effect to earning management.

Keywords: Earning Manajemen, Profitability, Audit Quality, Board of Commissioner.

1. Pendahuluan

Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama periode pelaporan dan dibuat untuk mempertanggungjawabkan tugas yang dibebankan kepadanya oleh pihak pemilik perusahaan (Bahri, 2016). Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi (IAI, 2015).

Parameter kinerja perusahaan yang mendapat perhatian utama dari investor dan kreditor dari laporan keuangan adalah laba. Pada saat dihadapkan pada ukuran kinerja akuntansi keuangan tersebut, investor dan kreditor harus yakin bahwa ukuran kinerja yang menjadi fokus perhatian mereka adalah ukuran kinerja yang mampu menggambarkan kondisi ekonomi perusahaan serta prospek pertumbuhan dimasa depan dengan lebih baik. Oleh karena itu, manajemen mempunyai kecenderungan untuk melakukan tindakan yang dapat membuat informasi laba menjadi baik.

Menurut IAI (2015) perusahaan harus menyusun laporan keuangan atas dasar akrual. Penggunaan dasar akrual dinilai lebih rasional dan adil dalam mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara nyata. Namun penggunaan dasar akrual memberikan keleluasaan bagi manajemen untuk memilih metode akuntansi yang akan dipergunakan selama tidak menyimpang dari Standar Akuntansi Keuangan. Menurut teori akuntansi positif, prosedur akuntansi yang digunakan oleh perusahaan tidak harus sama dengan lainnya, namun perusahaan diberi kebebasan untuk memilih salah satu alternatif

prosedur yang tersedia untuk meminimumkan biaya kontrak dan memaksimalkan nilai perusahaan. Pilihan metode akuntansi tertentu yang sengaja dipilih oleh manajemen untuk tujuan tertentu dapat mengarah pada praktik manajemen laba (*earning manajemen*).

Scott (2015) mendefinisikan manajemen laba dengan tindakan yang dilakukan melalui pilihan kebijakan akuntansi untuk memperoleh tujuan tertentu, misalnya untuk memenuhi kepentingan sendiri atau meningkatkan nilai pasar perusahaan mereka. Manajer dapat melakukan campur tangan dengan memodifikasi tentang bagaimana mereka menginterpretasikan berbagai standar akuntansi keuangan dan data akuntansi (Healy dan Wahlen, 1999). Jika pada suatu kondisi dimana pihak manajemen ternyata tidak berhasil mencapai target laba yang ditentukan, maka manajemen akan memanfaatkan fleksibilitas yang diperbolehkan oleh standar akuntansi dalam menyusun laporan keuangan untuk memodifikasi laba yang dilaporkan. Manajemen termotivasi untuk memperlihatkan kinerja yang baik dalam menghasilkan nilai atau keuntungan maksimal bagi perusahaan sehingga manajemen cenderung memilih dan menerapkan metode akuntansi yang dapat memberikan informasi laba lebih baik. Adanya asimetri informasi memungkinkan manajemen untuk melakukan manajemen laba.

Menurut Stice dkk (2011:361) beberapa pendorong para manajer untuk melakukan manajemen laba adalah memenuhi target internal, memenuhi harapan eksternal, meratakan atau memuluskan laba (*income smooting*) dan mempercantik laporan keuangan (*window dressing*).

Manajer mempunyai kewajiban untuk memaksimalkan kesejahteraan para pemegang saham dan debtholders, namun disisi lain manajer juga mempunyai kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri. Penyatuan kepentingan pihak-pihak ini seringkali menimbulkan masalah-masalah yang disebut dengan masalah keagenan (*agency problem*). Manajemen laba merupakan salah satu masalah keagenan yang terjadi karena adanya pemisahan antara pemegang saham dengan manajemen perusahaan. Konflik keagenan akan muncul apabila tiap-tiap pihak, baik principal maupun agent mempunyai perbedaan kepentingan dan ingin memperjuangkan kepentingan masing-masing (Jensen & Meckling, 1976). Hubungan keagenan tersebut terkadang menimbulkan masalah atau konflik antara manajer dan pemegang saham yang bisa berimplikasi pada timbulnya biaya keagenan karena adanya asimetris informasi.maka dari itu harus terdapat kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan prinsipal dan agen.

Penelitian terdahulu mengemukakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen laba. Diantaranya, profitabilitas (didukung oleh penelitian Guna dan Arleen, 2010 dan Agustin, 2015), kualitas audit (Gerayli et al. 2011 dan Rusmin, 2010), nilai perusahaan (Aji dan Mita, 2010 dan Agustin dan Suwardi, 2015), dewan komisaris independen (Ujiyantho dan Bambang, 2011 dan Yermack, 1996) dan ukuran dewan komisaris (Nasution dan Setiawan, 2007 dan Yemarck, 1996).

Berdasarkan penelitian empiris terdahulu mengenai manajemen laba masih menunjukkan hasil tidak konsisten satu dengan yang lainnya, karena beberapa faktor masih didapatkan berpengaruh dan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Penulis bertujuan untuk melakukan penelitian dengan variabel berupa profitabilitas, kualitas audit, nilai perusahaan, dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris dan manajemen laba. Dengan tujuan untuk membuktikan ketidakkonsistenan yang muncul. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka penulis mengambil judul “Pengaruh Profitabilitas, Kualitas Audit, Nilai Perusahaan, Dewan Komisaris Independen dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI”

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Teori Keagenan (Agency Theory)

Dalam teori keagenan menjelaskan tentang dua pelaku ekonomi yang saling bertentangan yaitu prinsipal dan agen. Menurut Anthony dan Govindarajan (2011), teori agensi adalah hubungan atau kontrak antara principal dan agent. Teori agensi memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata

termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara principal dan agent. Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi principal (Scott, 2015).

Scott (2015) menyatakan bahwa inti dari agency theory atau teori keagenan adalah pendesainan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan prinsipal dan agen dalam hal terjadi konflik kepentingan.

Timbul manajemen laba dapat dijelaskan dengan teori keagenan (agency theory). Teori ini menyatakan bahwa praktik manajemen laba dipengaruhi konflik kepentingan antara manajemen (agent) dan pemilik (principal) yang timbul ketika setiap pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaknya. Ketika manajer mempunyai informasi yang lebih cepat dan lebih banyak dibandingkan pihak eksternal, manajer kemudian menggunakan informasi yang diketahuinya untuk memanipulasi pelaporan keuangan dalam usaha memaksimalkan kemakmurannya.

2.2. Teori Akuntansi Positif (*Positive Accounting Theory*)

Teori akuntansi positif (*positive accounting theory*) sering dikaitkan dalam pembahasan mengenai manajemen laba (*earnings management*). Teori akuntansi positif menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen dalam memilih prosedur akuntansi yang optimal dan mempunyai tujuan tertentu. Menurut teori akuntansi positif, prosedur akuntansi yang digunakan oleh perusahaan tidak harus sama dengan yang lainnya, namun perusahaan diberi kebebasan untuk memilih salah satu alternatif prosedur yang tersedia untuk meminimumkan biaya kontrak dan memaksimalkan nilai perusahaan. Dengan adanya kebebasan itulah, maka menurut Scott (2015) manajer mempunyai kecenderungan melakukan suatu tindakan yang menurut teori akuntansi positif dinamakan sebagai tindakan oportunistik (*opportunistic behavior*). Jadi, tindakan oportunistik adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam memilih kebijakan akuntansi yang menguntungkan dan memaksimalkan kepuasan perusahaan tersebut. Kebebasan untuk memilih salah satu alternatif prosedur yang tersedia untuk tujuan tertentu dapat mengarah pada praktik manajemen laba.

Dalam *Positif Accounting Theory* terdapat tiga faktor pendorong yang melatarbelakangi terjadinya manajemen laba (Watt dan Zimmerman dalam Rahmawati dkk, 2006), yaitu:

- **Bonus Plan Hypothesis**
Manajemen akan memilih metode akuntansi yang memaksimalkan utilitasnya yaitu bonus yang tinggi. Manajer perusahaan yang memberikan bonus besar berdasarkan laba lebih banyak menggunakan metode akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan.
- **Debt Covenant Hypothesis**
Manajer perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian kredit cenderung memilih metode akuntansi yang memiliki dampak meningkatkan laba (Sweeney, 1994). Hal ini untuk menjaga reputasi mereka dalam pandangan pihak eksternal.
- **Political Cost Hypothesis**
Semakin besar perusahaan, semakin besar pula kemungkinan perusahaan tersebut memilih metode akuntansi yang menurunkan laba. Hal tersebut dikarenakan dengan laba yang tinggi pemerintah akan segera mengambil tindakan, misalnya: mengenakan peraturan antitrust, menaikkan pajak pendapatan perusahaan, dan lain-lain.

2.3. Manajemen Laba (*Earnings Management*)

Scott (2015) mendefinisikan manajemen laba dengan tindakan yang dilakukan melalui pilihan kebijakan akuntansi untuk memperoleh tujuan tertentu, misalnya untuk memenuhi kepentingan sendiri atau meningkatkan nilai pasar perusahaan mereka. Dimana manajemen laba menghasilkan pelaporan

keuangan yang tidak netral yang didalamnya manajer secara intensif melakukan campur tangan untuk menghasilkan beberapa keuntungan pribadi. Manajemen laba merupakan tindakan manajer untuk meningkatkan (menurunkan) laba yang dilaporkan saat ini dari suatu unit yang menjadi tanggung jawab manajer tanpa mengkaitkan dengan peningkatan (penurunan) profitabilitas ekonomi jangka panjang (Fischer dan Rosenzweig, 1995). Manajemen laba diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan dengan sengaja, dalam batasan General Accepted Accounting Principles (GAAP).

Manajemen laba (*earnings management*) dilakukan dengan mempermainkan komponen-komponen akrual dalam laporan keuangan, sebab akrual merupakan komponen yang mudah untuk dipermainkan sesuai dengan keinginan orang yang melakukan pencatatan transaksi dan menyusun laporan keuangan. Alasannya, komponen akrual merupakan komponen yang tidak memerlukan bukti kas secara fisik sehingga upaya mempermainkan besar kecilnya komponen akrual tidak harus disertai dengan kas yang diterima atau dikeluarkan perusahaan (Sulistyanto, 2016).

Scott (2015) mengemukakan beberapa motivasi terjadinya manajemen laba :

- **Bonus Purposes**
Manajer yang memiliki informasi atas laba bersih perusahaan akan bertindak secara oportunistik untuk melakukan manajemen laba dengan memaksimalkan laba saat ini (Healy, 1985).
- **Political Motivations**
Manajemen laba digunakan untuk mengurangi laba yang dilaporkan pada perusahaan publik. Perusahaan cenderung mengurangi laba yang dilaporkan karena adanya tekanan publik yang mengakibatkan pemerintah menetapkan peraturan yang lebih ketat.
- **Taxation Motivations**
Motivasi penghematan pajak menjadi motivasi manajemen laba yang paling nyata. Berbagai metode akuntansi digunakan dengan tujuan penghematan pajak pendapatan.
- **Pergantian CEO**
CEO yang mendekati masa pensiun akan cenderung menaikkan pendapatan untuk meningkatkan bonus mereka. Dan jika kinerja perusahaan buruk, mereka akan memaksimalkan pendapatan agar tidak diberhentikan.
- **Initial Public Offering (IPO)**
Perusahaan yang akan go public belum memiliki nilai pasar, dan menyebabkan manajer perusahaan yang akan go public melakukan manajemen laba dalam prospectus mereka dengan harapan dapat menaikkan harga saham perusahaan.
- **Pentingnya Memberi Informasi Kepada Investor**
Informasi mengenai kinerja perusahaan harus disampaikan kepada investor sehingga pelaporan laba perlu disajikan agar investor tetap menilai bahwa perusahaan tersebut dalam kinerja yang baik.

2.4. Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan (Kasmir, 2016). Rasio Profitabilitas dimaksudkan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva atau hasil penjualan (Purwanto, 2014). Profitabilitas merupakan rasio utama dalam seluruh laporan keuangan karena tujuan utama perusahaan adalah hasil operasi atau keuntungan. Profitabilitas dapat digunakan sebagai pengukur kinerja perusahaan. Rasio ini mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan (Fahmi, 2013:135).

2.5. Kualitas Audit

Ada beberapa kelompok definisi kualitas audit yang diidentifikasi oleh Watkins dalam Wiryadi dan Nurzi (2013). Pertama Lee, Liu dan Wang (1999) kualitas audit merupakan probabilitas bahwa auditor tidak akan melaporkan laporan audit dengan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang mengandung kekeliruan material. Kedua menurut Neu (1993) menyatakan kualitas audit diukur dari akurasi informasi yang dilaporkan oleh auditor, kemudian kualitas audit ditentukan dari kemampuan audit untuk mengurangi noise dan bias dan meningkatkan kemurnian (*fineness*). DeAngelo (1981) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya.

2.6. Nilai Perusahaan

Gitman (2015), nilai perusahaan adalah nilai aktual per lembar saham yang akan diterima apabila aset perusahaan dijual sesuai harga saham. Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi. Menurut Noerirawan (2012), nilai perusahaan merupakan kondisi yang telah dicapai oleh suatu perusahaan sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan setelah melalui suatu proses kegiatan yang selama beberapa tahun, yaitu sejak perusahaan tersebut sampai dengan saat ini. Nilai perusahaan lazim diindikasikan dengan *price to book value*. *Price to book value* (PBV) yang tinggi akan membuat pasar percaya atas prospek perusahaan kedepan.

2.7. Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris merupakan organ perusahaan yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan penuh atas pengurusan perusahaan. Fungsi dewan komisaris termasuk di dalamnya komisaris independen antara lain, melakukan pengawasan terhadap direksi dalam pencapaian tujuan perusahaan dan memberhentikan direksi untuk sementara bila diperlukan. (Warsono, dkk. 2009).

Mayangsari (2004) komisaris independen adalah anggota komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali serta bebas dari hubungan bisnis dan hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Komite Nasional Kebijakan Good Corporate Governance 2004).

2.8. Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris adalah jumlah seluruh anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan (Sembiring, 2005). Ukuran dewan komisaris merupakan suatu hal yang tidak boleh dikesampingkan. Semakin banyaknya anggota dewan komisaris maka akan menyulitkan dalam menjalankan peran mereka, di antaranya kesulitan dalam berkomunikasi dan mengkoordinir kerja dari masing-masing anggota dewan itu sendiri, kesulitan dalam mengawasi dan mengendalikan tindakan dari manajemen, serta kesulitan dalam mengambil keputusan yang berguna bagi perusahaan. Penelitian yang dilakukan Yermack (1996) dan Jensen (1993) menjelaskan bahwa ukuran dewan komisaris yang kecil lebih efektif dalam melakukan tindakan pengawasan dibandingkan dewan komisaris yang berukuran besar. Ukuran dewan komisaris yang besar dianggap kurang efektif dalam menjalankan fungsinya karena sulit dalam komunikasi, koordinasi serta pembuatan keputusan.

2.9. Pengaruh Profitabilitas terhadap Manajemen Laba

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan (Kasmir, 2016). Rasio Profitabilitas dimaksudkan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva atau hasil penjualan (Purwanto, 2014). Profitabilitas merupakan rasio utama dalam seluruh laporan keuangan karena tujuan utama perusahaan adalah hasil operasi atau keuntungan.

Menurut Anthony dan Govindarajan (2005), teori agensi adalah hubungan atau kontrak antara principal dan agent. Teori agensi memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara principal dan agent. Seperti dalam teori keagenan yang menyatakan bahwa manajemen memiliki informasi yang lebih banyak mengenai perusahaan dibandingkan dengan pemilik perusahaan yang sering terdorong untuk melakukan tindakan yang dapat memaksimalkan keuntungan dirinya dan perusahaan. Manajer yang memiliki informasi atas laba bersih perusahaan akan bertindak secara oportunistik untuk melakukan manajemen laba dengan memaksimalkan laba saat ini.

Penelitian Guna dan Arleen (2010) serta penelitian oleh Agustin (2015) menyatakan profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Laba yang dihasilkan perusahaan selama satu tahun berjalan dapat menjadi indikator terjadinya praktik manajemen laba dalam suatu perusahaan biasanya manajemen laba dilakukan oleh manajer untuk memanipulasi komponen laba rugi yang dilaporkan perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan peneliti adalah sebagai berikut:

H1 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Manajemen Laba

2.10. Pengaruh Kualitas Audit terhadap Manajemen Laba

De Angelo (1981) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Kualitas audit yang baik mampu mengurangi ketidakselarasan yang terjadi antara pihak manajemen dan pemilik. Ketidakseimbangan informasi atau asimetri informasi dan konflik kepentingan yang terjadi antara principal dan agent mendorong agent untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada principal, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja agent. Oleh sebab itu kualitas audit sangat berperan penting karena sebagai bentuk penilaian terhadap hasil keprofesionalan seorang auditor. Terutama dalam mendeteksi, menganalisis dan melaporkan hasil penemuan audit terhadap laporan klien. Menurut Becker et al dalam Wiryadi dan Nurzi (2013) menyatakan bahwa terdapat hubungan antara kualitas audit dan manajemen laba. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Gerayli et al. (2011) dan Rusmin (2010) yang menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan peneliti adalah sebagai berikut:

H2 : Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap Manajemen Laba

2.11. Pengaruh Nilai Perusahaan terhadap Manajemen Laba

Menurut teori akuntansi positif, prosedur akuntansi yang digunakan oleh perusahaan tidak harus sama dengan yang lainnya, namun perusahaan diberi kebebasan untuk memilih salah satu alternatif prosedur yang tersedia untuk meminimumkan biaya kontrak dan memaksimalkan nilai perusahaan. Dengan adanya kebebasan itulah, maka menurut Scott (2015) manajer mempunyai kecenderungan melakukan suatu tindakan yang menurut teori akuntansi positif dinamakan sebagai tindakan oportunistik (opportunistic behavior). Banyak manajer perusahaan tetap percaya bahwa pasar modal mengkapitalisasi laba dan perusahaan tidak mempunyai kekuasaan mempengaruhi pasar kecuali melalui labayang akan dilaporkan oleh perusahaan. Oleh karena mungkin paramanajer akan berupaya

meningkatkan nilai saham perusahaan melalui teknik akuntansi yang dapat meningkatkan laba yang dilaporkan. Sebagai konsekuensinya, investor mungkin secara temporal dapat tertipu berkaitan dengan nilai fundamental perusahaan. Atau sebaliknya, strategi pengungkapan laba merupakan sarana penting bagi manajer untuk menyampaikan informasi yang dimilikinya mengenai perusahaan kepada pihak eksternal. Dengan demikian manajemen laba merupakan signal yang valid bagi informasi privat yang relevan untuk penilaian perusahaan. Hasil uji hipotesis yang dilakukan oleh Aji dan Mita (2010) dan Agustin (2015) menunjukkan bahwa nilai perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan peneliti adalah sebagai berikut:

H3 : Nilai Perusahaan berpengaruh positif terhadap Manajemen Laba

2.12. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Manajemen Laba

Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan berfungsi sebagai penyeimbang dalam proses pengambilan keputusan guna memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait dengan perusahaan (Mayangsari, 2004). Dalam agency problem (masalah keagenan) pemegang saham yang merupakan principal mendelegasikan pengambilan keputusan bisnis kepada manajer yang merupakan perwakilan atau agen dari pemegang saham. Permasalahan yang muncul sebagai akibat sistem kepemilikan perusahaan seperti ini bahwa adalah agen tidak selalu membuat keputusan yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan terbaik principal. Hasil penelitian Dechow, Patricia, Sloan dan Sweeney (1996), Klein (2002), Peasnell, Pope dan Young (2001), Chtourou et al. (2001), Pratana dan Mas'ud (2003), dan Xie, Biao, Wallace dan Peter (2003) dalam Ujijantho dan Bambang (2007) memberikan simpulan bahwa perusahaan yang memiliki proporsi anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan atau outside director dapat mempengaruhi tindakan manajemen laba. Sehingga, jika anggota dewan komisaris dari luar meningkatkan tindakan pengawasan, hal ini juga akan berhubungan dengan makin rendahnya penggunaan discretionary accruals (Cornett et al., dalam Ujijantho dan Bambang, 2007). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ujijantho dan Bambang (2007) dan Yermarck (1996) menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen laba. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan peneliti adalah sebagai berikut:

H4 : Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap Manajemen Laba

2.13. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Manajemen Laba

Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah anggota dewan komisaris perusahaan baik berasal dari internal perusahaan maupun dari eksternal perusahaan (Ujijantho, 2007). Semakin banyaknya personil yang menjadi dewan komisaris dapat berakibat pada makin buruknya kinerja yang dimiliki perusahaan. Hal tersebut dapat dijelaskan dalam agency problem (masalah keagenan) yaitu dengan makin banyaknya anggota dewan komisaris semakin sulit dalam menjalankan perannya, diantaranya kesulitan dalam berkomunikasi dan mengkoordinir kerja dari masing-masing anggota dewan itu sendiri, kesulitan yang dialami adalah sulitnya menjalankan tugas pengawasan terhadap manajemen perusahaan yang nantinya berdampak pula terhadap kinerja perusahaan yang semakin menurun. Penelitian dilakukan oleh Nasution dan Setiawan (2007), Yermarck (1996) yang menemukan bahwa semakin besar ukuran dewan komisaris maka semakin besar kecurangan dalam pelaporan keuangan. Ukuran dewan komisaris yang besar dianggap kurang efektif dalam menjalankan fungsinya karena sulit dalam komunikasi, koordinasi serta pembuatan keputusan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan peneliti adalah sebagai berikut:

H5 : Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap Manajemen Laba

3. Metode Penelitian

3.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.1.1. Manajemen Laba

Manajemen laba adalah suatu sarana yang digunakan manajemen untuk mengurangi variabilitas urutan-urutan target yang terikat karena adanya manipulasi variabel-variabel (akuntansi) semu atau (transaksi) riil. Metode pengukuran yang akan digunakan dalam manajemen laba, yaitu *modified Jones models* dengan model perhitungan sebagai berikut.

1. Menghitung total akrual

$$TA_{it} = NI_{it} - CFO_{it}$$

Dimana :

TA_{it} : akrual total perusahaan i pada periode t

NI_{it} : Laba bersih perusahaan i pada tahun t

CFO_{it} : Kas dari perusahaan i pada tahun t

2. Menghitung akrual Non-Diskresioner (*Non-Discretionary Accrual*)

Nilai total accrual (TA) yang diestimasi dengan persamaan regresi *Ordinary Least Square* (OLS) sebagai berikut:

$$NDA_{it} = \alpha_i \left(\frac{1}{A_{it-1}} \right) + \beta_1 i \left(\frac{\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it}}{A_{it-1}} \right) + \beta_2 i \left(\frac{PPE_{it}}{A_{it-1}} \right) + \epsilon_{it}$$

Dengan menggunakan koefisien regresi diatas, nilai *non discretionary accruals* (NDA) dapat dihitung dengan rumus :

$$NDA_{it} = \alpha_i \left(\frac{1}{A_{it-1}} \right) + \beta_1 i \left(\frac{\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it}}{A_{it-1}} \right) + \beta_2 i \left(\frac{PPE_{it}}{A_{it-1}} \right)$$

Dimana:

NDA_{it} : *Non discretionary accrual* perusahaan i pada tahun t

A_{it-1} : total aset perusahaan i pada tahun t-1

ΔREV_{it} : pendapatan perusahaan i pada periode t dikurangi pendapatan pada periode t-1.

ΔREC_{it} : piutang perusahaan i pada periode t dikurangi piutang pada periode t-1.

PPE_{it} : aset tetap berwujud kotor perusahaan i pada periode t.

$\alpha, \beta_1, \beta_2, \beta_3$: koefisien regresi model Jones.

3. Menghitung akrual diskresioner (*discretionary accrual*)

Berdasarkan dua persamaan sebelumnya, maka pengukuran nilai akrual diskresioner (DA) diestimasi dengan selisih antara total akrual dengan nilai akrual non-diskresioner (NDA).

$$DA_{it} = \frac{TA_{it}}{A_{it-1}} - NDA_{it}$$

Dimana:

DA_{it} : akrual diskresioner perusahaan i pada periode t.

NDA_{it} : akrual non-diskresioner perusahaan i pada periode t.

TA_{it} : akrual total perusahaan i pada periode t.

A_{it-1} : aset total perusahaan i pada periode t-1 (awal tahun).

3.1.2. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan, yang berguna untuk bagi pihak-pihak yang berkepentingan (pemegang saham, kreditur dan manajemen perusahaan

(Kasmir, 2016). Rasio *profitabilitas* dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan *Return On Assets* (ROA). Brigham dan Houston (2014) secara matematis *return on asset* (ROA) diformulasikan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Earning After Tax}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

3.1.3. Kualitas Audit

Kualitas audit sangat menentukan kredibilitas laporan keuangan. Kualitas audit dalam penelitian ini diukur melalui proksi ukuran KAP tempat auditor tersebut bekerja, yang dibedakan menjadi KAP *Big Four* dan KAP *Non Big Four* (Guna, 2010). Kualitas audit diukur dengan skala nominal melalui variabel *dummy*. Angka 1 digunakan untuk mewakili perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* dan angka 0 digunakan untuk mewakili perusahaan yang tidak diaudit oleh KAP *Non Big Four*.

3.1.4. Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. Nilai perusahaan pada beberapa penelitian dapat didefinisikan melalui *price per book*. Dalam penelitian ini nilai perusahaan diukur dengan PBV (*Price to Book Value*) yang digunakan (Agustin, 2015) yang diukur sebagai berikut:

$$PBV = \frac{\text{Harga Pasar per Lembar Saham}}{\text{Nilai Buku per Lembar Saham}}$$

3.1.5. Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006). Variabel Dewan komisaris Independen diukur dengan menggunakan proksi proposi dewan komisaris independen yang dihitung dengan rumus sebagai berikut (Boediono, 2005).

$$DKI = \frac{\text{jumlah anggota dewan komisaris independen}}{\text{jumlah anggota dewan komisaris perusahaan}}$$

3.1.6. Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah anggota dewan komisaris perusahaan. Ukuran dewan komisaris diukur dengan menggunakan indikator jumlah anggota dewan komisaris suatu perusahaan baik yang berasal dari internal perusahaan maupun eksternal perusahaan.

3.2. Metode Pengambilan Sampel

Populasi Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian yaitu dari tahun 2014-2017. Objek penelitian adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan *purposive sampling method*. Jumlah keseluruhan perusahaan manufaktur yang ada di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017, terdapat 55 perusahaan yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam pemilihan sampel dan 220 jumlah observasi.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1. Deskriptif Statistik

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat dari nilai minimum, nilai maximum, rata-rata (mean), dan standar deviasi yang dihasilkan dari variabel penelitian. Hasil analisis statistik deskriptif untuk variabel-variabel penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Table 1. Deskriptif Statistik

| Variabel | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|----------|---------|---------|---------|----------------|
| ML | 12,00 | 18,70 | 14,1230 | 1,08382 |
| ROA | 0,04 | 52,67 | 8,4789 | 7,85338 |
| KA | 0,00 | 1,00 | 0,4409 | 0,49763 |
| PBV | 0,00 | 48,67 | 3,0678 | 5,66215 |
| DKI | 0,20 | 1,00 | 0,4031 | 0,11270 |
| UDK | 2,00 | 12,00 | 4,3682 | 2,02177 |

4.2. Hasil Analisis Berganda

Tabel 3 menunjukkan nilai F-hitung sebesar 46,442 dengan tingkat signifikansi 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa pengujian hipotesis dapat dianalisis lebih lanjut, atau model persamaan regresi yang digunakan adalah fit (layak). Jadi dapat disimpulkan bahwa model penelitian yang digunakan dianggap layak uji dan keempat variabel mampu menjelaskan fenomena bagaimana kinerja keuangan daerah di Kabupaten Bengkulu Tengah.

Tabel 3 juga memperlihatkan nilai koefisien determinasi berganda disesuaikan (R^2) sebesar 0,764. Angka tersebut memberikan arti bahwa kinerja keuangan daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dipengaruhi oleh partisipasi publik, akuntabilitas, transparansi dan integritas sebesar 76,4%. Baik atau buruknya kinerja keuangan daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dipengaruhi oleh keempat variabel tersebut. Sedangkan sisanya 23,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Hasil pengujian hipotesis pertama (H1) diketahui bahwa partisipasi publik berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,008 kurang dari tingkat signifikansi ($\alpha < 0,05$) dengan arah nilai koefisien positif ($\beta_1 = 0,710$), yang artinya bahwa partisipasi publik berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Hasil ini sejalan dengan hipotesis yang diajukan, dimana terdapat pengaruh positif partisipasi publik terhadap kinerja keuangan daerah, sehingga hipotesis pertama diterima.

Hasil pengujian hipotesis kedua (H2) diketahui bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,047 kurang dari tingkat signifikansi ($\alpha < 0,05$) dengan arah nilai koefisien positif ($\beta_2 = 0,206$), yang artinya bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Hasil ini sejalan dengan hipotesis yang diajukan, dimana terdapat pengaruh positif akuntabilitas terhadap kinerja keuangan daerah, sehingga hipotesis kedua diterima.

Hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) diketahui bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,809 lebih besar dari tingkat signifikansi ($\alpha < 0,05$), walaupun demikian arah nilai koefisiennya positif ($\beta_3 = 0,034$), yang artinya bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Dengan demikian, hasil ini tidak sejalan dengan hipotesis yang diajukan, dimana tidak terdapat pengaruh transparansi terhadap kinerja keuangan daerah, sehingga hipotesis ketiga ditolak.

Selanjutnya, hasil pengujian hipotesis keempat (H4) diketahui bahwa integritas berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,003 kurang dari tingkat signifikansi ($\alpha < 0,05$) dengan arah nilai koefisien positif ($\beta_4 = 0,631$), yang artinya bahwa integritas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Hasil ini sejalan dengan hipotesis yang diajukan, dimana terdapat pengaruh positif integritas terhadap kinerja keuangan daerah, sehingga hipotesis keempat diterima.

Table 3. Hasil Regresi Berganda

| Variabel | Koefisien | Nilai t | Sig |
|-------------------------|-----------|---------|-------|
| Partisipasi Publik | 0,710 | 2,752 | 0,008 |
| Akuntabilitas | 0,206 | 2,036 | 0,047 |
| Transparansi | 0,034 | 0,243 | 0,809 |
| Integritas | 0,631 | 3,099 | 0,003 |
| Adjusted R ² | | 0,764 | |
| F-hitung | | 46,442 | |
| Sig | | 0,000 | |

4.3. Pengaruh Partisipasi Publik terhadap Kinerja Keuangan Bengkulu Tengah

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa variabel partisipasi publik berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Hasil analisis tersebut juga didukung oleh hasil in-depth interview yang dilakukan terhadap beberapa informan yang menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah telah memberikan wadah kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti adanya sistem e-planning dan MUSRENBANG untuk menampung aspirasi masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Permana (2015), menunjukkan bahwa partisipasi publik berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan daerah pada SKPD di Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian yang dilakukan Putra (2014) juga menunjukkan bahwa partisipasi publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi layanan publik.

4.4. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Bengkulu Tengah

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Hasil ini bermakna semakin tinggi tingkat akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah terhadap setiap kegiatan ataupun program yang telah dilaksanakan maka kinerja keuangan daerah juga akan semakin baik. Hasil analisis tersebut juga didukung oleh hasil in-depth interview yang dilakukan terhadap beberapa informan menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah telah melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan aturan hukum atau regulasi yang ada. Semua program/kegiatan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan berdasarkan DPA yang telah disetujui sebelumnya, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Permana (2015), menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian yang dilakukan Saputra (2014), juga menunjukkan hal yang sama bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

4.5. Pengaruh Integritas terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa variabel integritas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Hasil ini bermakna semakin tinggi tingkat integritas Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah maka kinerja keuangan daerah juga akan semakin baik.

Hasil analisis tersebut juga didukung oleh hasil in-depth interview yang dilakukan terhadap beberapa informan yang menunjukkan bahwa para pengelola keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah telah memiliki integritas cukup tinggi. Dimana para pengelola keuangan daerah telah mengikuti nilai-nilai yang ada di instansi, melaksanakan tugas sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan, dan menyelesaikan setiap tugas mengikuti kode etik dan peraturan yang ada.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Yusnaena dan Syahril (2013), menunjukkan bahwa integritas berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Erina (2012), juga menunjukkan bahwa integritas berpengaruh terhadap Kinerja Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Inspektorat Aceh.

5. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi publik berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi publik terhadap setiap kegiatan ataupun program pemerintah daerah maka kinerja keuangan daerah juga akan semakin baik atau target kinerja keuangan akan tercapai. Akuntabilitas terbukti berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat akuntabilitas pemerintah daerah maka kinerja keuangan daerah juga akan semakin baik atau dengan kata lain kinerja keuangan suatu daerah yang dihasilkan oleh pemerintah juga akan tercapai. Integritas terbukti berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi integritas pengelola keuangan daerah maka kinerja keuangan daerah akan semakin baik pula atau dengan kata lain kinerja keuangan akan tercapai.

Sedangkan, transparansi tidak terbukti berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Dalam penelitian ini transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bengkulu Tengah sudah ada, namun hasilnya menunjukkan bahwa tingkat transparansi tidak mempengaruhi kinerja keuangan daerah, tinggi atau rendahnya transparansi tidak mempengaruhi kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Beberapa keterbatasan yang ada dalam penelitian ini antara lain, tidak dilibatkannya pihak eksternal (masyarakat) sebagai responden dalam menjawab pertanyaan variabel transparansi. Serta tidak dilibatkannya beberapa OPD di tingkat Kecamatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dikarenakan keterbatasan waktu dan akses yang tidak memungkinkan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melibatkan pihak eksternal (masyarakat) sebagai responden dalam menjawab pertanyaan variabel transparansi, serta bisa melibatkan seluruh OPD yang ada agar hasil penelitian lebih valid :

Daftar Pustaka

- Djalil, Rizal. 2014. Akuntabilitas Keuangan Daerah Implementasi Pasca Reformasi. Jakarta: RMBOOKS PT. Wahana Semesta Intermedia.
- Erina, Cut dan Darwanis. 2012. Pengaruh Integritas, Objektivitas, Kerahasiaan dan Kompetensi terhadap Kinerja Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (studi pada Inspektorat Aceh). ISSN 2302-0164 Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Volume 2 Nomor 1. Hal 15-27.

-
- Hajar, Nuzul Ibnu. 2017. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran pada UPTD Taman Budaya Sulawesi Tenggara. Skripsi: Halu Oleo.
- OECD. 2016. OECD Kajian Open Government Indonesia hal-hal Pokok 2016.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Permana, Imam Arif. 2015. Pengaruh Partisipasi Publik dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD di Kabupaten Pesisir Selatan). Artikel Ilmiah: Universitas Negeri Padang.
- Pusat Bahasa. 2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Putra, Hendra G. 2014. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Publik Terhadap Kinerja Organisasi Layanan Publik (Studi Empiris pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pasaman Barat). Artikel Ilmiah: Universitas Negeri Padang.
- Saputra, Devi Satria dan Darwanis. 2014. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi pada Pemda Kabupaten Aceh Selatan). ISSN 2302-0164 Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Volume 3 Nomor 2. Hal 76-84.
- Situs resmi BPK. <http://www.bengkulu.bpk.go.id>. Diakses pada 3 November 2017.
- Turner, M., dan David Hulme. 1997. Governance, Administration, and Development. London: MacMillan Press.
- Yusnaena dan Syahril. 2013. Pengaruh Integritas Terhadap Kinerja Karyawan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. ISSN 1693-2617 Jurnal Menara Ilmu Volume 9 Nomor 42. Hal 186-191.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan